

## INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2019-2021

### INTERPRETATION OF THE BALI PROVINCIAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS 2019-2021

**Ferica Christinawati Putri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Borneo Tarakan

*fericacputri@borneo.ac.id*

#### ABSTRAK

Pemberlakuan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual menuntut akuntabilitas dan transparansi pada setiap Pemerintah Daerah di Indonesia. Bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Daerah diwujudkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari LKPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali dengan menggunakan Rasio Operasi dan Komitmen Layanan, Rasio Kelenturan Keuangan, Rasio Likuiditas Operasional, Rasio Solvabilitas Jangka Pendek, dan Rasio Kemandirian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Operasi dan Komitmen Layanan setiap tahunnya mengalami penurunan, Rasio Kelenturan Keuangan menunjukkan kondisi keuangan yang baik dalam memenuhi belanja wajib, Rasio Likuiditas Operasional menunjukkan kemampuan organisasi dalam beroperasi dengan baik, Rasio Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan total aset lancar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali sangat cukup untuk memenuhi kewajiban lancar, dan Rasio Kelenturan Keuangan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali kontribusi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Rasio A termasuk kategori baik dan Rasio B termasuk pada kategori tidak baik dalam mendanai aktivitas pemerintahannya.

**Kata kunci :** Kondisi Keuangan, Rasio Keuangan, Akuntabilitas.

#### ABSTRACT

*The implementation of an accrual-based government accounting system demands accountability and transparency for every local government in Indonesia. The form of regional government accountability and transparency is realized through the Regional Government Financial Report (LKPD). This research is a descriptive quantitative research using data sources originating from the LKPD of the Provincial Government of Bali for the 2019-2021 Fiscal Year. This study aims to measure the financial condition of the Provincial Government of Bali by using Operational and Service Commitment Ratios, Financial Flexibility Ratios, Operational Liquidity Ratios, Short Term Solvency Ratios, and Financial Independence Ratios. The results show that the Operational Ratio and Service Commitment have decreased every year, the Financial Flexibility Ratio shows good financial conditions in meeting mandatory spending, the Operational Liquidity Ratio shows the ability of the organization to operate properly, the Short-Term Solvency Ratio shows the total current assets owned by the Provincial Government Bali is sufficient to meet current liabilities, and the Financial Flexibility Ratio shows that the Provincial Government of Bali contributes Local Own Revenue based on Ratio A which is in the good category and Ratio B is included in the bad category in funding its government activities.*

**Keywords :** *Financial Condition, Financial Ratios, Accountability.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara demokrasi yang telah menerapkan sistem otonomi daerah dengan asas desentralisasi fiskal. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis dengan otonomi daerah bertujuan untuk memudahkan penyampaian pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan otonomi daerah yaitu agar membawa dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa proses akuntansi terdiri dari proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta interpretasi atas hasil dari proses akuntansi tersebut. Dalam memenuhi syarat terwujudnya akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah telah melaksanakan proses akuntansi tersebut, namun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum digunakan secara optimal untuk pengambilan keputusan, yang disebabkan kualitas LKPD yang kurang informatif serta memiliki pengaruh paradigma politik di Indonesia (Suhartanto, 2013).

Pemerintahan di Indonesia, pada setiap tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, harus menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan kinerja aktual dibandingkan

dengan anggaran, dan laporan arus kas (UU 17/2003, UU 1/2004, UU 32/2004, dan PP 58/2005). Laporan keuangan ini memberi tahu pengguna tentang nilai total aset, total utang, aset bersih, total pendapatan, total pengeluaran, arus kas masuk dan keluar. Pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel diwujudkan melalui LKPD, sehingga masyarakat sebagai pemberi amanah kepada pemerintah membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran. Namun, kemampuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan tidak dimiliki oleh semua masyarakat (Putri, 2022). LKPD yang diaudit ini tidak cukup memberi tahu pengguna tentang kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Ritonga, 2014).

Mengetahui kondisi keuangan suatu Pemerintahan Daerah menjadi sangat penting karena pemerintah merupakan penyedia utama layanan langsung kepada masyarakat, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan jalan dan jembatan (Ritonga, 2014). Namun, Pemerintah Daerah hanya dapat memberikan layanan ini jika dalam kondisi keuangan yang sehat. Kondisi keuangan seperti itu menjamin keberlanjutan Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dengan kualitas yang sesuai. Selain itu, Pemerintah Daerah dengan kondisi keuangan yang sehat tidak hanya berdampak langsung pada masyarakat setempat, tetapi juga berperan penting dalam perekonomian.

Jika Pemerintah Daerah gagal memenuhi kewajiban keuangannya, ekonomi regional dapat terpengaruh secara negatif (Honadle, 2003).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap kondisi kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun anggaran 2019-2021 untuk mengukur ketercapaian pengelolaan keuangan yang telah diamanahkan oleh rakyat yang merupakan wujud dari kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Interpretasi terhadap kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bali ini menggunakan beberapa rasio keuangan pada Sistem Pemantauan Tren Keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga (2014).

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* menyatakan bahwa perilaku seorang akan menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi untuk melayani kepentingan seseorang (Muth & Donaldson, 1998). Menurut teori *stewardship*, para manajer selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan optimalisasi utilitas kelompok prinsipal serta manajemen. Teori ini menemukan bahwa suatu organisasi akan sukses bila bila organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga akan berdampak pada kepuasan kepada pengguna layanan dan pengelola organisasi (Muth & Donaldson, 1998).

### **Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah**

Kondisi keuangan merupakan probabilitas kemampuan suatu pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur, konsumen, karyawan, pembayar pajak, pemasok, konstituen, dan lain-lain karena jatuh tempo (Berne & Scramm, 1986). Kondisi keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai layanannya secara berkelanjutan (Nollenberger, 2003). Nollenberger mengklasifikasikan kondisi keuangan menjadi: rasio solvabilitas kas, rasio solvabilitas anggaran, rasio solvabilitas jangka panjang, dan rasio solvabilitas tingkat layanan. Rasio solvabilitas kas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan uang tunai yang cukup selama 30 atau 60 hari untuk membayar tagihannya. Rasio Solvabilitas anggaran adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai tingkat layanan saat ini atau yang diinginkan. Rasio solvabilitas jangka panjang adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi semua kegiatan pengeluarannya termasuk pengeluaran rutin serta yang hanya akan muncul pada tahun-tahun di mana mereka harus dibayar. Lebih lanjut, solvabilitas tingkat layanan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan pada tingkat dan kualifikasi yang diperlukan dan diinginkan oleh orang-orangnya.

*Canadian Institute of Chartered Accountant* (CICA, 1997)

mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah sebagai yang diukur dari aspek keberlanjutan, kerentanan, dan fleksibilitas dalam konteks keseluruhan lingkungan ekonomi dan keuangan. Keberlanjutan merupakan kondisi dimana pemerintah mampu mempertahankan program yang sudah ada dan memenuhi persyaratan kreditor tanpa menimbulkan beban utang pada perekonomian. Kerentanan adalah suatu kondisi dimana pemerintah menjadi tergantung sehingga mengakibatkan kerentanan terhadap sumber pendanaan di luar kendali baik yang bersumber dari domestic maupun internasional. Fleksibilitas adalah kondisi dimana pemerintah dapat meningkatkan sumber daya keuangannya untuk merespon peningkatan komitmen melalui peningkatan pendapatan dan meningkatkan kapasitas utang.

Kloha et al. (2005) memberikan definisi bahwa kondisi keuangan merupakan konteks dari *fiscal distress*. Kloha et al. (2005) mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kondisi di mana Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi standar dalam operasi, utang, dan kebutuhan masyarakat mereka selama beberapa tahun berturut-turut, sedangkan Jones dan Walker (2007) menafsirkan *fiscall distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan tingkat layanan yang sudah ada sebelumnya kepada masyarakat. Di sisi lain, Hendrick (2004) mendefinisikan kondisi keuangan dari segi kesehatan fiskal. Dia mendefinisikannya sebagai kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi

kewajiban keuangan serta layanan kepada masyarakat. Rivenbark dan Roenigk (2011) mendefinisikannya sebagai kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan, layanan, dan modal yang sedang berlangsung berdasarkan status aliran sumber daya dan stok sebagaimana ditafsirkan dari keadaan keuangan tahunan.

Dari berbagai definisi yang telah dikembangkan para perneliti dan isntitusi sebelumnya, maka definisi kondisi keuangan yang paling banyak diterima adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu dan kemampuan untuk mempertahankan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan rasio keuangan pada Sistem Pemantauan Tren Keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga (2014):

### 1. Rasio Operasi dan Rasio Komitmen Layanan

Rasio operasi dan rasio komitmen digunakan untuk mengukur kemampuan operasional organisasi untuk mendapatkan sumber daya dari menjalankan tugas dan fungsi yang dimilikinya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya tanpa mengurangi capaian layanan yang telah ada (Ritonga, 2014).

$$\text{Rasio Operasi (A1)} = \frac{\text{Surplus (LO)}}{\text{Defisit}} \frac{\text{Total Beban}}$$

$$\text{Rasio Operasi (A2)} = \frac{\frac{\text{Surplus}}{\text{Defisit}} (LO)}{\text{Total Pendapatan (LO)}}$$

$$\text{Rasio Komitmen (B1)} = \frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan Aktiva Tetap}}$$

$$\text{Rasio Komitmen (B2)} = \frac{\text{Beban Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan Aktiva Tetap}}$$

## 2. Rasio Kelenturan Keuangan

Kelenturan keuangan merupakan indikator yang menunjukkan sumber daya bebas yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kelenturan keuangan dilihat dari kemampuan pendapatan operasional organisasi dalam memenuhi belanja wajib setiap tahun. Belanja wajib merupakan semua belanja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan layanan yang sudah ada.

$$\text{Rasio A} = \frac{(\text{Pendapatan Operasional} - \text{Belanja Wajib})}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{(\text{Pendapatan Operasional} - \text{Belanja Wajib})}{\text{Total Belanja Wajib}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{(\text{Pendapatan Operasional} - \text{Belanja Wajib})}{\text{Total Pendapatan}}$$

Semakin besar nilai Rasio Kelenturan Keuangan, maka semakin baik kondisi keuangan pemerintah daerah karena memiliki sumber daya bebas untuk meningkatkan layanan. (Ritonga, 2014).

## 3. Rasio Likuiditas Operasional

Likuiditas operasional merupakan kemampuan organisasi untuk beroperasi tanpa mengurangi capaian layanan yang sudah ada, baik kualitas maupun kuantitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemda untuk menyediakan

dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat

$$\text{Rasio Likuiditas Operasional} = \frac{\text{Kas}}{\text{Belanja Wajib}}$$

Semakin besar nilai rasio likuiditas operasional maka organisasi semakin memiliki kemampuan beroperasi tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas layanan yang telah ada (Ritonga, 2014).

## 4. Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek

Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan dua belas bulan.

$$\text{Rasio A} = \frac{(\text{Kas dan Setara Kas} - \text{Investasi Jangka Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{(\text{Kas dan Setara Kas} - \text{Investasi Jangka Pendek} + \text{Piutang})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

## 5. Rasio Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi dimana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan diluar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber nasional maupun internasional

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah LRA}}{\text{Total Pendapatan LRA}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah LRA}}{\text{Total Belanja}}$$

Semakin besar nilai rasio-rasio tersebut, maka semakin besar pula

kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai aktivitas pemerintah daerah (Ritonga, 2014)

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Rasio keuangan pada penelitian ini menggunakan beberapa rasio dalam STPK yang terdiri dari Rasio Operasi dan Komitmen Layanan, Rasio Kelenturan Keuangan, Rasio Likuiditas Operasional, Rasio Solvabilitas Jangka Pendek, dan Rasio Kemandirian Keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) dari 15 (lima belas) indikator pada Sistem Pemantauan Tren Keuangan (STPK) yang dikonsepsikan oleh Ritonga (2014) untuk mengukur kondisi

keuangan Pemerintah Daerah. Sumber data berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Bali selama tahun 2019-2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

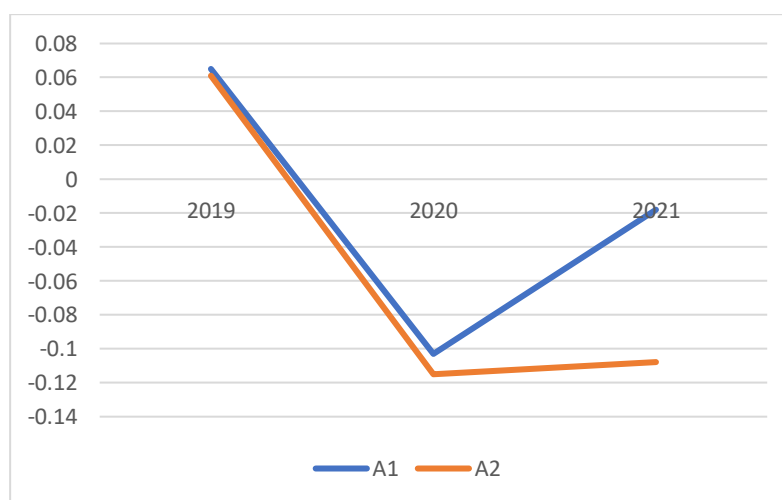
### Rasio Operasi dan Komitmen Layanan

Pada tahun 2020, nilai pertumbuhan rasio operasi A1 sebesar 0,168 dan A2 0,175. Nilai pertumbuhan Rasio Komitmen Layanan B1 sebesar 0,034 dan B2 0,039. Sedangkan pada tahun 2021 nilai rasio operasi A1 (-0,085) dan  $\Delta A2$  (-0,097). Nilai pertumbuhan B1 (-0,045) dan B2 (-0,076) yang artinya kondisi kemampuan beroperasi Pemerintah Daerah Bali sangat buruk.

**Tabel 1. Tabel Rasio Operasi Provinsi Bali Tahun 2019-2021**

Tahun	2019	2020	2021	$\Delta 2020$	$\Delta 2021$
A1	0,065	-0,103	-0,018	0,168	-0,085
A2	0,061	-0,115	-0,108	0,175	-0,097

Sumber: Data diolah, 2022



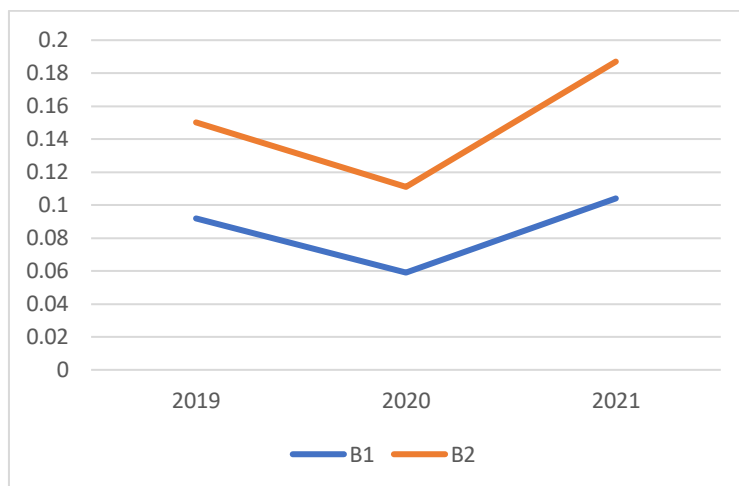
Sumber: Data diolah, 2022

**Gambar 1. Grafik Rasio Operasi Provinsi Bali Tahun 2019-2021**

**Tabel 2. Tabel Rasio Komitmen Layanan Provinsi Bali Tahun 2019-2021**

Tahun	2019	2020	2021	$\Delta 2020$	$\Delta 2021$
B1	0,092	0,059	0,104	0,034	-0,045
B2	0,150	0,111	0,187	0,039	-0,076

Sumber: Data diolah, 2022



Sumber: Data diolah, 2022

**Gambar 2. Grafik Rasio Komitmen Layanan Provinsi Bali Tahun 2019-2021**

Pertumbuhan negatif pada rasio operasi dan komitmen layanan menunjukkan kemampuan operasional yang sangat buruk karena tidak memiliki sumber daya bebas dalam meningkatkan pelayanan (Bisma, 2010). Pada prinsipnya pemberian pelayanan harus mampu menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Ritonga, 2014).

Hal ini disebabkan oleh kemampuan Pemerintah Provinsi Bali

untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya semakin menurun. Hal ini tidak sejalan dengan teori *Stewardship* yang mengatakan bahwa organisasi akan mengupayakan kepentingan jangka Panjang organisasi dan penerima layanan.

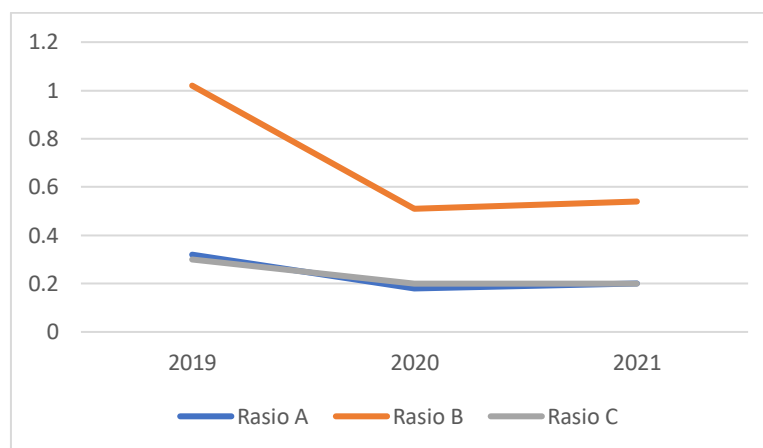
#### **Rasio Kelenturan Keuangan**

Semakin besar nilai rasio kelenturan keuangan, maka semakin baik kondisi keuangan pemerintah daerah karena memiliki sumber daya bebas untuk meningkatkan layanan.

**Tabel 3. Tabel Rasio Kelenturan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali 2019-2021**

Tahun	2019	2020	2021
Rasio A	0,32	0,18	0,20
Rasio B	1,02	0,51	0,54
Rasio C	0,30	0,20	0,20

Sumber: Data diolah, 2022



Sumber: Data diolah, 2022

**Gambar 3. Grafik Rasio Rasio Kelenturan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021**

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bali, Belanja wajib hanya terdiri dari Belanja pegawai dan penyusutan. Terdapat tiga rasio dalam menghitung kelenturan keuangan yaitu Rasio A, Rasio B dan Rasio C.

Dari perhitungan ketiga operasi tersebut terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, untuk Rasio A sebesar 0,14, Rasio B sebesar 0,51 dan Rasio C sebesar 0,10. Jika dilihat dari perhitungan, kelenturan keuangan Pemerintah Daerah Bali dalam keadaan baik.

Nilai Rasio Kelenturan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali, maka semakin baik kondisi keuangan memiliki nilai positif dari pembilang

(Pendapatan Operasional - Belanja Wajib) menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki sumber daya bebas (*free resources*) yang tersedia untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

### Rasio Likuiditas Operasional

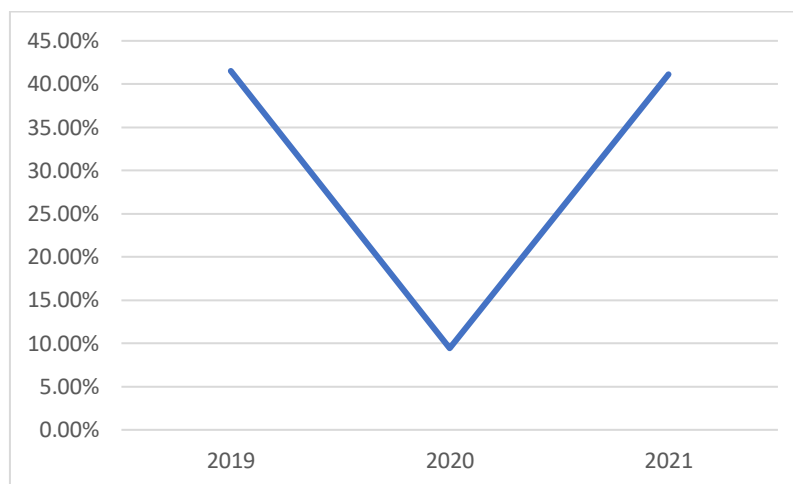
Semakin besar nilai rasio likuiditas operasional maka organisasi semakin memiliki kemampuan beroperasi tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas layanan yang telah ada. Hasil rasio likuiditas juga menunjukkan bahwa kas tersedia untuk memenuhi total belanja wajib.



**Tabel 4. Tabel Rasio Likuiditas Operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021**

Tahun	2019	2020	2021
Rasio Likuiditas Operasional	41,525	9,44%	41,13%

Sumber: Data diolah, 2022



Sumber: Data diolah, 2022

**Gambar 4. Grafik Rasio Likuiditas Operasional Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021**

Hasil perhitungan rasio likuiditas operasional pada tahun 2019 sebesar 41,52%, pada tahun 2020 sebesar 9,44% dan pada tahun 2021 sebesar 41,13%.

Untuk tahun 2019-2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan, dikarenakan jumlah kas pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 191.594.109.904,54. Namun, untuk tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 31,69%. Nilai kas yang lebih besar daripada belanja wajib menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mampu untuk melaksanakan belanja wajib dengan menggunakan kas yang ada. Hal ini sejalan dengan teori *Stewardship* bahwa pemimpin organisasi dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Bali sebagai principal mengupayakan untuk

tercapainya kesuksesan organisasi (Muth & Donaldson, 1998). Ketercapaian kinerja pemerintah dapat dilihat dari kemampuan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan.

#### **Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek**

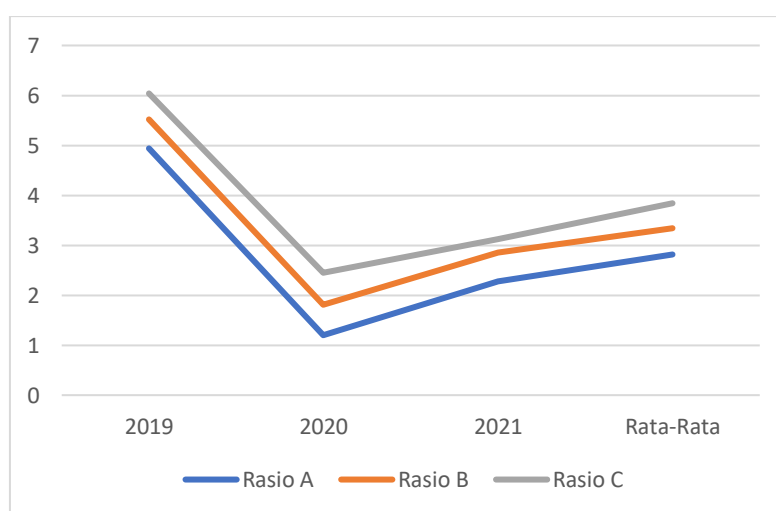
Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan dua belas bulan.

Nilai minimal untuk Rasio A sebaiknya adalah satu kali dengan maksud agar setiap Rp 1 kewajiban lancar dijamin dengan Rp 1 aset lancar yang likuid.

**Tabel 5. Tabel Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021**

Tahun	2019	2020	2021	Rata-Rata
Rasio A	4,94	1,20	2,28	2,81
Rasio B	5,52	1,81	2,85	3,34
Rasio C	6,04	2,45	3,12	3,84

Sumber: Data diolah, 2022



Sumber: Data diolah, 2022

**Gambar 5. Grafik Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021**

Dalam interpretasinya, semakin tinggi nilai ketiga rasio tersebut mengindikasikan semakin banyak aktiva lancar Pemda yang tersedia untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya. Namun demikian nilai rasio yang terlalu tinggi merupakan indikator yang kurang baik karena menunjukkan bahwa Pemda memiliki aktiva lancar yang berlebih sehingga pelayanan publik menjadi kurang optimal (Putri, 2022).

Meski secara konsep nilai-nilai tersebut mencerminkan kapasitas keuangan yang baik, namun dari sisi manajemen dan perencanaan anggaran

nilai rasio rasio tersebut di Kota Magelang tergolong cukup tinggi. Nilai yang tinggi ini memberi indikasi bahwa alokasi aset untuk pelayanan masyarakat kurang optimal, sehingga banyak yang menjadi *idle* di akhir tahun pembukuan (Ritonga, 2014).

Selama kurun waktu tahun 2019-2021 rasio solvabilitas jangka pendek di Provinsi Bali memiliki rata-rata untuk rasio A sebesar 2,80; rasio B 3,39 dan rasio C sebesar 3,83. Kenaikan indikator ini menunjukkan total aset lancar yang dimiliki Pemerintah

Provinsi Bali sangat cukup untuk memenuhi kewajiban lancar.

### Rasio Kemandirian Keuangan

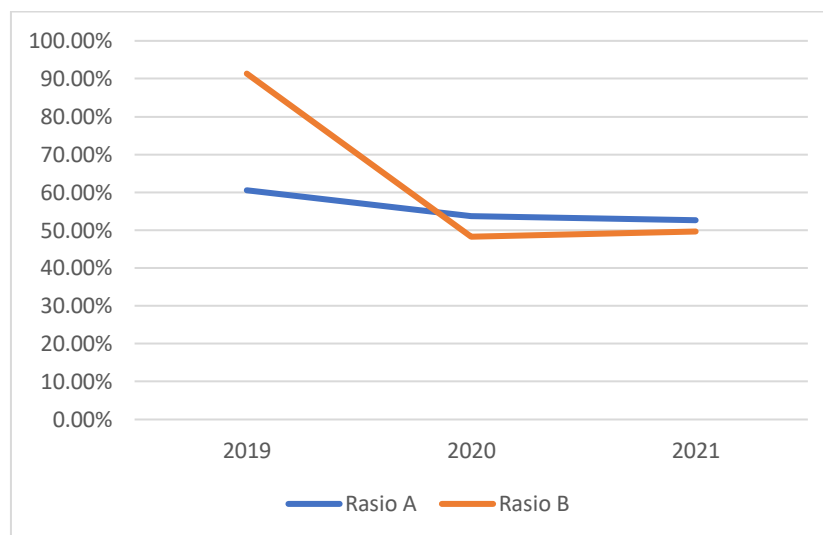
Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi dimana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan

diluar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber nasional dan internasional. Semakin besar nilai rasio-rasio tersebut, maka semakin besar pula kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai aktivitas pemerintah daerah.

**Tabel 6. Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021**

Tahun	2019	2020	2021
Rasio A	60,54%	53,68%	52,63%
Rasio B	91,36%	48,28%	49,71%

Sumber: Data diolah, 2022



Sumber: Data diolah, 2022

**Gambar 6. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021**

Untuk Rasio A, terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 6,86% dan terjadi penurunan lagi pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 1,05%. Untuk Rasio B, terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 43,08% dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,43%.

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bali Tahun 2019, 2020, dan 2021 mengenai rasio kemandirian, berdasarkan Rasio A Pemerintah Provinsi Bali memiliki komposisi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar daripada total pendapatan. Berdasarkan Rasio B Pemerintah Provinsi Bali pada tahun

2019 memiliki komposisi total Pendapatan Asli Daerah yang sangat mandiri, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 komposisi total Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan untuk melaksanakan belanja daerah hal ini disebabkan oleh keterpurukan kondisi pada masa pandemi covid-19. Ketergantungan fiskal Pemerintah Bali terhadap Pemerintah Pusat mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa dana alokasi yang bersumber dari Pemerintah Pusat menjadi dominan dalam mengelola pemerintahan di Provinsi Bali. Kemandirian keuangan yang lemah ini juga dapat disebabkan oleh kebijakan yang terdapat dalam konstitusi Indonesia (Indriani, 2020).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai program kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah dengan kemampuan pendapatan asli daerah yang kuat akan memiliki kondisi keuangan yang baik pula (Ritonga, 2014). Keterbatasan pemerintah daerah dalam mengali potensi ekonomi memang disebabkan oleh konstitusi Indonesia yang mengatur hal tersebut adanya kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber- sumber pendapatan daerah (Bisma, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh negara yang mempengaruhi

kehidupan rakyat dikendalikan oleh pemerintah pusat. Ini berdampak kepada sumber strategis penerimaan seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai meskipun sumber-sumber tersebut terletak di wilayah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, semua itu akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah pusat.

Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap dituntut untuk meningkatkan melalui inovasi. Inovasi ini tetap diatur di dalam peraturan undang-undang sehingga tidak ada yang bertentangan. Kemampuan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya bervariasi antar pemerintah daerah.

## **KESIMPULAN**

Rasio Operasi dan Komitmen Layanan setiap tahunnya mengalami penurunan, Rasio Kelenturan Keuangan menunjukkan kondisi keuangan yang baik dalam memenuhi belanja wajib, Rasio Likuiditas Operasional menunjukkan kemampuan organisasi dalam beroperasi dengan baik, Rasio Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan total asset lancar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali sangat cukup untuk memenuhi kewajiban lancar, dan Rasio Kelenturan Keuangan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang baik dalam mendanai aktivitas

pemerintahannya. Secara keseluruhan kondisi keuangan pada Pemerintah Provinsi Bali telah mengupayakan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi untuk melayani kepentingan umum, hal ini mendukung Teori *Stewardship* yaitu Pemerintah Provinsi Bali sebagai prinsipal telah memaksimalkan kepentingan organisasi. Hal terpenting dari otonomi daerah adalah terselenggaranya layanan publik terhadap masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Pelayanan publik merupakan hak dari masyarakat daerah yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah daerah agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan. Kinerja aparat pemerintah masih relatif rendah dan belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan publik, ketika melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab, terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pada prinsipnya setiap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan senantiasa harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Berne, R., & Scramm, R. (1986). *The Financial Analysis of Governments*. Prentice-Hall.
- Bisma, I Dewa Gde, dan Hery Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *GaneÇ Swara Edisi Khusus* Vol. 4 No.3.
- CICA. (1997). *Indicators of Government Financial Condition*. Toronto: Canadian Institute of Chartered Accountants.
- Fatnuriawan, Ayok. 2014. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2014. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Hakim, Abdul. 2017. Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). Pekanbaru: JOM Fekon.
- Hendrick, R. 2004. Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local Government: Focus on Chicago Suburban Municipalities. *Urban Affairs Review*, 40, 78-114.
- Honadle. (2003). *Kesehatan Fiskal Pemerintah Daerah*. Academic Press.
- Indriani, I.K (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Kalimantan. Inventory: Jurnal Akuntansi Vol.4 No. 2
- Jones, S & Walker, R 2007, 'Explanators of local government distress', *Abacus*, vol. 43, no. 3, pp. 396-418.

- Kloha, P., Weissert, C. S. & Kleine, R. 2005. Developing and testing a composite model to predict local fiscal distress. *Public Administration Review*, 65, 313-323.
- Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah*. Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>, di akses pada 5 Agustus 2020
- Muth, M., & Donaldson, L. (1998). Stewardship Theory and Board Structure: a contingency approach. *EconPapers*, 5-28.
- Nollenberger, K. (2003). *Evaluating Financial Condition: A Handbook For Local Government*. Washington: International City/County Managers Association.
- Suhartanto. (2013, May 28). Retrieved from Pusdiklatwas: [https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/as-set/files/post/20130528\\_163218/Efektivitas%20LKPD%20Pengambilan%20Keputusan.docx](https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/as-set/files/post/20130528_163218/Efektivitas%20LKPD%20Pengambilan%20Keputusan.docx)
- Putri, F. C. (2022). Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi*, 410-415.
- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 142-164.
- Ritonga, I.T, 2014, Analysing Service-Level Solvency of Local Governments from Accounting Perspective: A Study of Local Governments in the Province of Yogyakarta Special Territory, Indonesia, *International Journal of Governmental Financial Management* Vol. XIV, No 2; 19
- Rivenbark, W. C. & Roenigk, D. J. 2011. Implementation of Financial Condition Analysis in Local Government. *Public Administration Quarterly*, 35, 241-267.
- Yacob, Yarlina . 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Volume 8, Nomor 3. Provinsi Kalimantan Barat: Jurnal eksos ISSN 1693 – 9093.